



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : UNIT INDUK DISTRIBUSI SUMATERA SELATAN JAMBI DAN BENGKULU (UID S2JB)

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ADHI HERLAMBANG
2. Jabatan : GENERAL MANAGER
3. NHK : 468591

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 176 m2/180 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 508.000.000

1. MOBIL, FORD FIESTA SPORTY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. MOBIL, INNOVA TYPE G Tahun 2018, LAINNYA Rp. 190.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV JEEP L.C.HDTP Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
4. MOTOR, ALVA MOTOR LISTRIK Tahun 2024, HADIAH Rp. 33.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 759.500.000

**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 403.884.965

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 3.971.384.965

**III. HUTANG** Rp. 12.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.959.384.965

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.